

MODEL KELEMBAGAAN EKONOMI PADA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI PROPINSI RIAU¹

Almasdi Syahza²

Lembaga Penelitian Universitas Riau, Pekanbaru

E-mail: asyahza@yahoo.co.id

Website: <http://almasdi.unri.ac.id>

Abstrak

Pembangunan perkebunan khususnya kelapa sawit di Daerah Riau telah membawa dampak ekonomi terhadap masyarakat, baik masyarakat yang terlibat dengan aktivitas perkebunan maupun terhadap masyarakat sekitarnya. Begitu pesatnya perkembangan luas areal perkebunan rakyat khususnya swadaya murni, maka perlu dirancang suatu model untuk menghindari ketimpangan pendapatan antara petani. Model kelembagaan tersebut bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan petani di pedesaan dalam bentuk Agroestate Berbasis Kelapa Sawit (ABK). Melalui program ABK ini petani memperoleh kesempatan untuk membeli/memiliki saham di pabrik kelapa sawit (PKS) perusahaan pengembang. Dalam model ABK ini terdapat dua kegiatan bisnis utama yaitu yang *pertama*, kegiatan bisnis membangun kebun dan pabrik industri serta jika diperlukan permukiman petani peserta yang akan dilakukan oleh perusahaan pengembang (developer); *kedua*, adalah bisnis mengelola kebun dan pabrik milik petani peserta serta memasarkan hasilnya yang dilakukan oleh badan usaha pengelola yaitu koperasi yang dibentuk oleh petani peserta itu sendiri. Model ABK merupakan konsep pembangunan perkebunan di pedesaan untuk masa datang, konsep ini dalam bentuk kerja sama dengan perusahaan pengembang.

Kata kunci: Kelembagaan ekonomi, agroestate, kelapa sawit

A. Pendahuluan

Sampai saat ini sektor agribisnis Indonesia memungkinkan untuk mampu bersaing guna merebut peluang pasar pada era perdagangan bebas. Di luar sektor agribisnis, bukan hanya sulit bersaing tetapi juga tidak mampu memberdayakan ekonomi rakyat. Pemihakan kebijakan pemerintah pada pengembangan sektor agribisnis dilevel makro perlu disertai dengan upaya mikro agar manfaat pembangunan dapat dinikmati oleh rakyat. Pengalaman lalu menunjukkan bahwa kontribusi yang besar sektor agribisnis dalam perekonomian nasional ternyata tidak diikuti peningkatan pendapatan petani yang memadai. Oleh karena itu, dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat, keberpihakan pada pembangunan sektor agribisnis secara nasional perlu

¹ Disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Pengelolaan Terpadu Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Propinsi Riau, Hotel Grand Elite Pekanbaru, 28 Juli 2010.

² Prof. Dr. Almasdi Syahza, SE., MP, Peneliti senior dan Pengamat Ekonomi Pedesaan di Lembaga Penelitian Universitas Riau.
email: asyahza@yahoo.co.id, website: <http://almasdi.unri.ac.id>

disertai dengan suatu mekanisme yang menjamin bahwa manfaat pembangunan dapat dinikmati oleh rakyat.

Ketidakterdayaan masyarakat pedesaan salah satunya akibat kebijakan yang *mismatch* di masa lalu, yaitu kebijakan yang melupakan sektor pertanian sebagai dasar keunggulan komparatif maupun kompetitif. Sesungguhnya pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan bukan hanya bermanfaat bagi masyarakat pedesaan itu sendiri, tetapi juga membangun kekuatan ekonomi Indonesia berdasarkan kepada keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki (Yuswar Zainal Basri, 2003).

Pembangunan pedesaan harus dapat mengurangi ketimpangan antara desa dan kota. Salah satu konsep yang pernah dikemukakan oleh Friedmann. J dan Mike Douglass dalam Almasdi Syahza (2009) adalah pengembangan agropolitan. Dalam konsep tersebut dikemukakan bagaimana cara mempercepat pembangunan di pedesaan dengan potensi yang dimiliki oleh desa. Untuk itu hal yang perlu dilakukan adalah: *Pertama*, merubah daerah pedesaan dengan cara memperkenalkan unsur-unsur gaya hidup kota (*urbanism*) yang telah disesuaikan pada lingkungan pedesaan tertentu. Bentuk ini tidak lagi mendorong perpindahan penduduk desa ke kota. Menanam modal di pedesaan merupakan salah satu cara menekan urbanisasi dan merubah tempat permukiman di desa menjadi suatu bentuk campuran yang dinamakan agropolis atau kota di ladang; *Kedua*, memperluas hubungan sosial di pedesaan sampai keluar batas-batas desanya, sehingga terbentuk suatu ruang sosio-ekonomi dan politik yang lebih luas (*agropolitan district*); *Ketiga*, memperkecil keretakan sosial (*social dislocation*) dalam proses pembangunan, yaitu: memelihara kesatuan keluarga, memperteguh rasa aman, dan memberi kepuasan pribadi dalam membangun masyarakat baru; *Keempat*, menstabilisasikan pendapatan desa dan kota. Memperkecil perbedaannya dengan cara memperbanyak kesempatan kerja yang produktif di pedesaan, khususnya memadukan kegiatan pertanian dengan nonpertanian dalam lingkungan masyarakat yang sama; *Kelima*, menggunakan tenaga kerja yang ada secara lebih efektif dengan mengarahkan pada usaha-usaha pengembangan sumberdaya di tiap-tiap *agropolitan district*, termasuk peningkatan hasil pertanian; *Keenam*, merangkai *agropolitan district* menjadi jaringan regional dengan cara membangun dan memperbaiki sarana hubungan antara *agropolitan district* dengan kota; *Ketujuh*, menyusun suatu pemerintahan dan perencanaan yang sesuai dengan lingkungan, sehingga dapat mengendalikan pemberian prioritas pembangunan serta pelaksanaannya pada penduduk daerahnya; *Kedelapan*, menyediakan sumber-sumber keuangan untuk membangun agropolitan.

Menurut Ginanjar Kartasasmita (1996), pembangunan pedesaan harus dilakukan dengan pendekatan yang sesuai dengan sifat dan cirinya. Pembangunan pedesaan harus mengikuti empat upaya besar, satu sama lain saling berkaitan dan merupakan strategi pokok pembangunan pedesaan, yaitu: *Pertama*, memberdayakan ekonomi masyarakat desa. Dalam upaya ini diperlukan masukan modal dan bimbingan-bimbingan pemanfaatan teknologi dan pemasaran untuk memampukan dan memandirikan masyarakat desa; *Kedua*, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pedesaan agar memiliki dasar yang memadai untuk meningkatkan dan memperkuat produktivitas dan daya saing; *Ketiga*, pembangunan prasarana di pedesaan. Untuk daerah

pedesaan prasarana perhubungan merupakan kebutuhan yang mutlak, karena prasarana perhubungan akan memacu ketertinggalan masyarakat pedesaan; dan *keempat*, membangun kelembagaan pedesaan baik yang bersifat formal maupun nonformal. Kelembagaan yang dibutuhkan oleh pedesaan adalah terciptanya pelayanan yang baik terutama untuk memacu perekonomian pedesaan seperti lembaga keuangan.

Bagi pemerintah Indonesia, pembangunan pedesaan selama ini mengacu kepada pembangunan sektor pertanian dan kemudian dikembangkan dalam bentuk agribisnis. Pembangunan pertanian yang dikembangkan dalam bentuk skala besar selama ini adalah subsektor perkebunan yang menjadi komoditi unggulan ekspor, antara lain; kelapa sawit, karet, gambir, kelapa. Bustanul Arifin (2001) menyatakan, pengembangan sektor pertanian dalam arti luas harus diarahkan kepada sistem agribisnis dan agroindustri, karena pendekatan ini akan dapat meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, pada hakekatnya dapat meningkatkan pendapatan bagi pelaku-pelaku agribisnis dan agroindustri di daerah.

Pengembangan sektor pertanian dalam arti luas harus diarahkan kepada sistem agribisnis dan agroindustri, karena pendekatan ini akan dapat meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, pada hakekatnya dapat meningkatkan pendapatan bagi pelaku-pelaku agribisnis dan agroindustri di daerah. Hasil penelitian Almasdi Syahza (2005b), faktor lain yang mendukung prospek pengembangan agribisnis untuk masa datang, antara lain: 1) penduduk yang semakin bertambah sehingga kebutuhan pangan juga bertambah, ini merupakan peluang pasar yang baik bagi pelaku agribisnis; 2) meningkatnya pendapatan masyarakat akan meningkatkan kebutuhan pangan berkualitas dan beragam (diversifikasi). Keragaman produk menuntut adanya pengolahan hasil (agroindustri); dan 3) perkembangan agribisnis juga akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah, meningkatkan pendapatan petani yang pada akhirnya diharapkan akan mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat.

Dalam pengembangan sektor pertanian ke depan masih ditemui beberapa kendala, terutama dalam pengembangan sistem pertanian yang berbasis agribisnis dan agroindustri. Kendala yang dihadapi dalam pengembangan pertanian khususnya petani skala kecil, antara lain (Almasdi Syahza, 2007a): 1) lemahnya struktur permodalan dan akses terhadap sumber permodalan, 2), ketersediaan lahan dan masalah kesuburan tanah, 3) pengadaan dan penyaluran sarana produksi, 4) terbatasnya kemampuan dalam penguasaan teknologi, 5) lemahnya organisasi dan manajemen usaha tani, dan 6) kurangnya kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia untuk sektor agribisnis. Petani merupakan sumberdaya manusia yang memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan suatu kegiatan usaha tani, karena petani merupakan pekerja dan sekaligus manajer dalam usaha tani itu sendiri.

Dalam upaya pembangunan ekonomi di pedesaan, pemerintah Propinsi Riau mengambil satu kebijakan yaitu pembangunan sektor pertanian yang difokuskan di daerah pedesaan. Untuk pembangunan ekonomi pedesaan tersebut pemerintah daerah telah mengembangkan sektor pertanian khususnya subsektor perkebunan dengan kelapa sawit sebagai komoditi utama. Ada beberapa alasan kenapa Pemerintah Daerah Riau mengutamakan kelapa sawit, antara lain: *Pertama*, dari segi fisik dan lingkungan keadaan daerah Riau

memungkinkan bagi pengembangan perkebunan kelapa sawit; *Kedua*, kondisi tanah yang memungkinkan untuk ditanami kelapa sawit menghasilkan produksi lebih tinggi dibandingkan daerah lain; *Ketiga*, dari segi pemasaran hasil produksi daerah Riau mempunyai keuntungan, karena letaknya yang strategis dengan pasar internasional yaitu Singapura; *Keempat*, daerah Riau merupakan daerah pengembangan Indonesia Bagian Barat dengan dibukanya kerjasama *Indonesia Malaysia Singapore Growth Triangle* (IMS-GT) dan *Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle* (IMT-GT), berarti terbuka peluang pasar yang lebih menguntungkan; dan *kelima*, berdasarkan hasil yang telah dicapai menunjukkan bahwa kelapa sawit memberikan pendapatan yang lebih tinggi kepada petani dibandingkan dengan jenis tanaman perkebunan lainnya (Almasdi Syahza, 2005b).

Dalam memacu pertumbuhan ekonomi sekarang kebijaksanaan ekonomi harus menganut paradigma baru dimana pemberdayaan ekonomi rakyat harus menjadi perhatian utama. Karena sebagian besar rakyat hidup pada sektor pertanian dan sektor ini masih memberikan kontribusi yang besar pada perekonomian negara, maka pemberdayaan ekonomi rakyat juga berarti membangun ekonomi pertanian dengan lebih baik. Pembangunan industri harus memperhatikan keterkaitan kebelakang (*backward linkage*) dengan sektor pertanian atau sektor primer sedangkan keterkaitan kedepan (*forward linkage*) harus memperhatikan pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah dan pemasaran yang baik sehingga produk yang dihasilkan tidak sia-sia. Konsep pengembangan pertanian ini disebut dengan konsep agribisnis

Untuk mewujudkan tujuan pengembangan ekonomi kerakyatan, terutama disektor pertanian maka perlu dipersiapkan kebijakan strategis untuk memperbesar atau mempercepat pertumbuhan sektor pertanian, khususnya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah pengembangan agribisnis yang terencana dengan baik dan terkait dengan pembangunan sektor ekonomi lainnya.

Untuk itu perlu dirancang model pembangunan ekonomi pedesaan berbasis pertanian (agribisnis). Rancangan ini diharapkan akan terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi pedesaan baik dari subsektor perkebunan maupun nonperkebunan. Hasil penelitian ini dapat merumuskan kegiatan-kegiatan atau strategi apa yang mesti ditempuh oleh pemerintah daerah untuk pengembangan pertanian ke depan dan strategi untuk pembangunan ekonomi pedesaan.

B. Kelapa Sawit dan Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan

Pembangunan perkebunan kelapa sawit bertujuan untuk menghilangkan kemiskinan dan keterbelakangan khususnya di daerah pedesaan, di samping itu juga memperhatikan pemerataan perekonomian antar golongan dan antar wilayah. Pembangunan pertanian yang berbasis perkebunan dalam arti luas bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat sehingga terjadi suatu perubahan dalam pola hidup masyarakat di sekitarnya.

Kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit diharapkan dapat mengangkat perekonomian masyarakat khususnya mereka yang bermata pencaharian dari sektor pertanian. Dampak dari pembangunan tersebut akan terlihat dari beberapa indikator, antara lain:

1. Angka *multiplier effect* ekonomi yang diciptakan dari kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit di pedesaan
2. Indek kesejahteraan masyarakat pedesaan sebagai akibat dari pembangunan perkebunan kelapa sawit.

Pembangunan perkebunan khususnya kelapa sawit di Daerah Riau telah membawa dampak ekonomi terhadap masyarakat, baik masyarakat yang terlibat dengan aktivitas perkebunan maupun terhadap masyarakat sekitarnya. Dari hasil penelitian Almasdi Syahza (2009) menjelaskan bahwa: pembangunan perkebunan kelapa sawit di Riau dapat mengurangi ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat dan mengurangi ketimpangan ekonomi antar kabupaten/kota; dapat menciptakan *multiplier effect* dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan; dan ekspor produk turunan kelapa sawit (CPO) dapat merangsang pertumbuhan ekonomi daerah Riau. Tingkat kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat pedesaan telah membawa dampak berkembangnya perkebunan di daerah, khususnya kelapa sawit dan karet. Pembangunan perkebunan ini sekarang lebih banyak dilakukan oleh masyarakat secara swadaya.

Aktivitas pembangunan perkebunan kelapa sawit yang melibatkan banyak tenaga kerja dan investasi yang relatif besar untuk industri hilirnya, diperkirakan secara positif merangsang, menumbuhkan dan menciptakan lapangan kerja serta lapangan berusaha. Melalui kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan selama proses kegiatan perkebunan kelapa sawit dan pembangunan industri hilirnya akan mempunyai keterkaitan ke belakang (*backward linkages*).

Dari segi penanaman investasi sektor perkebunan yang dilaksanakan, hampir semua daerah kabupaten/kota memanfaatkan investasi. Jika dilihat dari segi dampak ekonominya menunjukkan hasil yang menggembirakan yakni terjadinya jumlah uang beredar di pedesaan. Hal ini berdampak terhadap meningkatnya daya beli masyarakat pedesaan, yang pada akhirnya meningkatnya mobilitas barang dan jasa.

Ada dua kemungkinan sebab mengapa fenomena ini terjadi. *Pertama*, investasi sektor perkebunan dan produk turunannya di daerah menyebabkan disparitas spasial antar daerah semakin mengecil. Hal ini lebih disebabkan investasi sector perkebunan lebih banyak menggunakan tenaga manual dibandingkan tenaga modern (peralatan), sehingga akan menambah pendapatan masyarakat di daerah sekitarnya; *Kedua*, kemungkinan pembangunan industri turunan kelapa sawit (PKS) di masing-masing daerah perkebunan juga menciptakan peluang kerja dan usaha bagi masyarakat tempatan, sehingga ini juga akan menambah daya beli masyarakat.

Dari hasil penelitian memperlihatkan pembangunan perkebunan kelapa sawit menimbulkan angka *multiplier effect* di daerah pedesaan. Pada tahun 2003 angka *multiplier effect* sebesar 4,23. Angka ini memberikan gambaran setiap investasi di daerah sebesar Rp 1,00 menyebabkan jumlah uang beredar sebesar Rp 4,23. Begitu juga pada tahun 2009 angka *multiplier effect* sebesar 3,03.

Apabila diamati tingkat pertumbuhan indek kesejahteraan petani di Riau pada tahun 1995 sebesar 0,49 yang berarti tingkat pertumbuhan kesejahteraan meningkat sebesar 49 persen dari periode sebelumnya. Dari Tabel 1 terlihat

pada tahun 1998 terjadi penurunan indeks kesejahteraan sebesar $-1,09$. Berarti kesejahteraan petani (khususnya masyarakat pedesaan) menurun dibandingkan pada tahun 1995. Penurunan ini disebabkan kondisi ekonomi nasional pada waktu itu tidak menguntungkan, harga barang melonjak naik, nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika menurun. Namun untuk tingkat golongan 80 persen berpendapatan rendah mengalami peningkatan. Yang paling besar adalah golongan 20 % terendah. Ini disebabkan karena ketergantungan mereka terhadap produk luar (barang sektor modern sangat rendah). Mereka lebih banyak memakai barang sektor tradisional atau produksi lokal.

Setelah ekonomi pulih kembali pada tahun 2003 indeks pertumbuhan kesejahteraan petani di pedesaan meningkat lagi menjadi 1,72. Berarti pertumbuhan kesejahteraan petani mengalami kemajuan sebesar 172 persen. Namun pada tahun 2006 memperlihatkan indeks pertumbuhan kesejahteraan petani sangat dirasakan oleh kelompok pendapatan 40% terendah (miskin), ini dibuktikan dengan angka indeks pertumbuhan kesejahteraan bernilai positif 0,18. Angka tersebut memperlihatkan selama periode tahun 2003-2006 kesejahteraan petani meningkat sebesar 18%. Yang merasakan hal tersebut lebih dominan kelompok pendapatan terendah. Kelompok berpenghasilan tertinggi (20% tertinggi) justru mengalami penurunan kesejahteraan.

Selama periode tahun 2006-2009, berdasarkan survey yang dilakukan tahun 2009 ternyata indeks kesejahteraan petani kelapa sawit masih mengalami nilai positif yakni sebesar 0,12. Walaupun pada patahun 2008-2009 ekonomi dunia mengalami krisis global, namun petani kelapa sawit masih sempat menikmati kesejahteraannya. Hal ini dibuktikan dengan kenaikan kesejahteraan petani sebesar 12%.

Rendahnya indeks kesejahteraan petani kelapa sawit periode tahun 2006-2009 juga tidak terlepas dari dampak krisis ekonomi global. Hal tersebut menyebabkan harga CPO di pasaran dunia pada akhir tahun 2008 sampai triwulan pertama tahun 2009 turun. Tentu saja dampak harga ini juga berpengaruh terhadap harga di tingkat petani kelapa sawit. Karena itu indeks kesejahteraan petani kelapa sawit turun dibandingkan periode sebelumnya. Perkembangan indeks kesejahteraan petani dan angka multiplier effect disajikan pada Tabel 1.

Aktivitas pembangunan perkebunan kelapa sawit memberikan pengaruh eksternal yang bersifat positif atau bermanfaat bagi wilayah sekitarnya. Manfaat kegiatan perkebunan ini terhadap aspek ekonomi pedesaan, antara lain: 1) Memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha; 2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar; dan 3) Memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Beberapa kegiatan yang secara langsung memberikan dampak terhadap komponen ekonomi pedesaan dan budaya masyarakat sekitar, antara lain: 1) Kegiatan pembangunan sumberdaya masyarakat desa; 2) Pembangunan sarana prasarana yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat, terutama sarana jalan darat; 3) Penyerapan tenaga kerja lokal; 4) Penyuluhan pertanian, kesehatan dan pendidikan; dan 5) Pembayaran kewajiban perusahaan terhadap negara (pajak-pajak dan biaya kompensasi lain).

Tabel 1. Pertumbuhan Indeks Kesejahteraan Petani Kelapa Sawit dan *Multiplier Effect* Ekonomi di Pedesaan Daerah Riau

Kelompok Pendapatan	1995 ¹⁾		1998 ²⁾		2003 ³⁾		2006 ⁴⁾		2009 ⁵⁾	
	w	g	w	g	w	g	w	g	w	g
20 % pendapatan terendah	0.0805	-0.0084	0.1513	0.0708	0.1169	-0.0344	0.1040	-0.0129	0.1127	-0.0087
20 % pendapatan terendah kedua	0.1267	0.0090	0.1946	0.0679	0.1583	-0.0363	0.1590	0.0007	0.1547	0.0043
20 % pendapatan terendah ketiga	0.1438	-0.0056	0.2152	0.0714	0.1831	-0.0321	0.1791	-0.0040	0.1841	-0.0050
20 % pendapatan terendah keempat	0.1955	-0.0119	0.2010	0.0055	0.2107	0.0097	0.2260	0.0153	0.2197	0.0063
20 % pendapatan tertinggi	0.4535	0.0167	0.2379	-0.2156	0.3309	0.0930	0.3319	0.0010	0.3288	0.0031
Indek Kesejahteraan	0.49		-1.09		1.72		0.18		0.12	
Multiplier Effect Ekonomi					4,37		2,48		3,03	

Catatan: Angka 2006 setelah perbaikan

- Sumber: 1) Almasdi Syahza, 1995
 2) Almasdi Syahza, 1998c
 3) Almasdi Syahza, 2005
 4) Almasdi Syahza, 2007c
 5) Hasil Survey, 2009

E. Pengembangan Model Kelembagaan Ekonomi Kelapa Sawit

Begitu pesatnya perkembangan luas areal perkebunan rakyat khususnya swadaya murni, maka perlu dirancang suatu model untuk menghindari ketimpangan pendapatan antara petani plasma dan swadaya. Model yang dirancang untuk peningkatan kesejahteraan petani di pedesaan adalah dalam bentuk Agroestate Berbasis Kelapa sawit (ABK).

Model yang disajikan ini dimaksudkan untuk mencoba menetralsir dikotomi-dikotomi dari pembagian keuntungan yang tidak adil antara petani kelapa sawit (plasma dan swadaya) dengan perusahaan inti, di samping untuk menjamin pengembangan perusahaan dan kelangsungan pabrik kelapa sawit (PKS) itu sendiri. Program pembangunan perkebunan kelapa sawit selama ini hanya terbatas untuk perkebunan rakyat (plasma) dan perkebunan perusahaan (inti). Pemilikan petani hanya sebatas kebun yang telah ditentukan dalam program plasma, sementara pabrik pengolah tandan buah segar (TBS) hanya dimiliki oleh perusahaan inti. Untuk ke depan perlu dipikirkan model bentuk kemitraan kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit, dimana petani memiliki kebun kelapa sawit dan pemilikan saham pada pabrik kelapa sawit (PKS). Petani membeli paket melalui koperasi yang terdiri dari kebun kelapa sawit dan saham PKS. Melalui program ABK ini petani memperoleh kesempatan untuk membeli/memiliki saham di PKS perusahaan inti.

Jaminan ketersediaan bahan baku secara kualitas, kuantitas maupun kontinuitas merupakan suatu keharusan untuk mencapai suatu agroindustri termasuk industri minyak sawit. Keterkaitan antara sumber penghasil bahan baku dan agroindustri kelapa sawit harus diintegrasikan ke dalam suatu pemilikan. Konsep kemitraan ini menekankan kepada azas kepemilikan bersama oleh petani baik usahataniya maupun pabrik pengolahannya, dimana pengelolaannya dilakukan oleh koperasi petani.

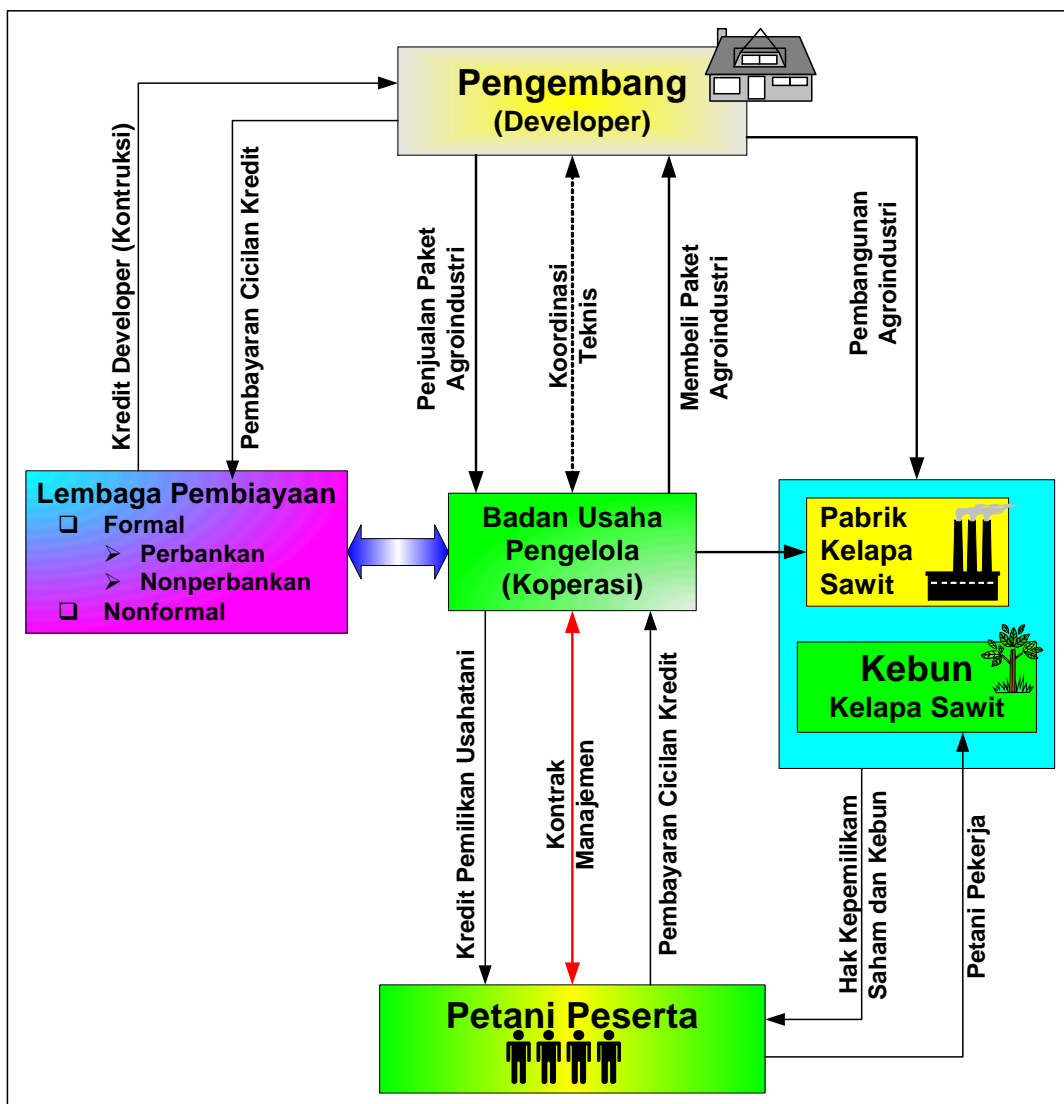
Aplikasi berorientasi kepada kesejahteraan petani melalui penekanan efisiensi pengolahan usahatani yang produktif serta peningkatan nilai tambah dalam konteks agribisnis, dimana kelembagaannya dirancang dalam jaringan kerja berdasarkan kemampuan dan profesionalisme yang dimiliki dari berbagai pelaku (aktor), yaitu pengusaha pengembang (developer usahatani), pabrik industri, permukiman petani peserta, petani peserta aktif, badan usaha pengelola (BUP) atau koperasi, atau manajemen pengelola (usahatani, pabrik industri), dan lembaga pembiayaan.

Dalam model agroestate berbasis kelapa sawit (ABK) ini terdapat dua kegiatan bisnis utama yaitu yang *pertama*, kegiatan bisnis membangun kebun dan pabrik industri serta jika diperlukan permukiman petani peserta yang akan dilakukan oleh perusahaan pengembang (developer); *kedua*, adalah bisnis mengelola kebun dan pabrik milik petani peserta serta memasarkan hasilnya yang dilakukan oleh badan usaha pengelola yaitu koperasi yang dibentuk oleh petani peserta itu sendiri. Model agroestate berbasis kelapa sawit (ABK) merupakan konsep pembangunan perkebunan di pedesaan untuk masa datang, konsep ini dalam bentuk kerja sama dengan perusahaan pengembang.

Model ABK dirancang untuk pembangunan ekonomi masyarakat di pedesaan yang berbasis pertanian (perkebunan kelapa sawit). Model ABK ini bertujuan untuk membangun perkebunan berbasis kelapa sawit yang

diperuntukkan bagi petani yang belum mempunyai lahan perkebunan dan atau bagi petani yang memiliki lahan tetapi tidak punya modal usaha untuk pengembangan usahatani. Petani ini sama sekali tidak mempunyai lahan yang layak untuk jaminan kehidupannya atau tidak mempunyai lahan untuk hidup layak bagi keluarga petani. Model ini merupakan pengembangan dari konsep agropolitan yang dicetuskan oleh Friedman dan Douglass (1976). Konsep agropolitan adalah salah satu strategi dalam percepatan pembangunan ekonomi pedesaan.

Secara singkat konsep model Agroestate Berbasis Kelapa Sawit (ABK) yang akan melibatkan masyarakat pedesaan (bagi petani yang belum memiliki lahan perkebunan) disajikan pada Gambar 1.

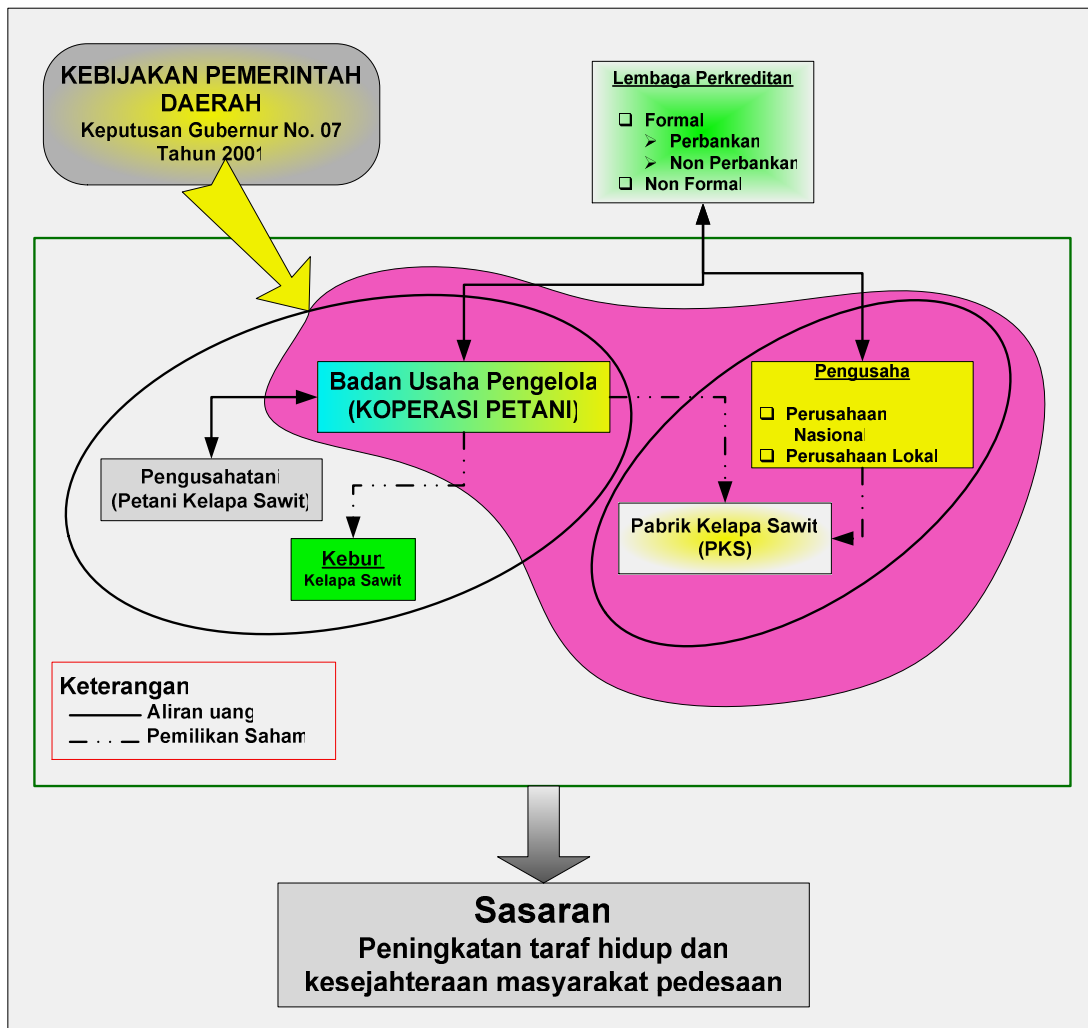


Gambar 1 Skema Konseptual Model Agroestate Berbasis Kelapa Sawit di Pedesaan

Untuk lebih jelasnya model tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- ❑ Perusahaan pengembang (developer) membangun kebun (usahatani) dan pabrik pengolahan hasil kebun (agribisnis) sampai kebun dalam bentuk siap menghasilkan dan pabrik industri dalam bentuk siap operasi. Sumber dana untuk membangun kebun pabrik dapat menggunakan dana sendiri atau pinjaman dari bank atau pihak lain yang memungkinkan.
- ❑ Kebun dan pabrik yang sudah dibangun oleh developer dijual dalam bentuk unit kaveling atau saham pabrik kepada petani aktif yaitu petani yang benar-benar berminat untuk mengelola kebun dan pesertanya adalah masyarakat pedesaan. Sebagai pemilik kebun petani peserta akan menerima sertifikat pemilikan tanah dan sebagai bukti pemilikan pabrik petani peserta akan menerima surat berharga dalam bentuk lembaran saham.
- ❑ Para petani peserta membeli kebun dan saham pabrik dengan menggunakan fasilitas kredit lembaga pembiayaan yang ada. Skim kredit ini difasilitasi ketersediaannya oleh pengusaha pengembang atau dapat pula oleh koperasi. Para petani peserta sebagai pemilik unit kavling menyerahkan pengelolaan (manajemen fee) yang besarnya telah ditentukan didalam kontrak manajemen berdasarkan kesepakatan. Perusahaan jasa manajemen akan mengelola kebun dan pabrik dengan prinsip-prinsip manajemen perkebunan yang terbaik dan profesional.
- ❑ Kepemilikan modal PKS bagi petani peserta dibatasi maksimum 40 % dari total modal kerja, selebihnya dimiliki oleh perusahaan inti dan saham pemerintah daerah. Ini bertujuan untuk menjaga profesional pengelolaan PKS. Model pemilikan saham dapat dilihat pada Gambar 2.
- ❑ Dalam pengelolaan kebun, petani aktif dikelompokkan ke dalam kelompok petani hamparan (KPH) dan diperlukan sebagai tenaga kerja yang mendapatkan upah sesuai kesepakatan.
- ❑ Pendapatan petani diharapkan cukup besar, karena dapat berasal dari berbagai sumber. Bagi petani aktif pendapatannya akan bersumber dari hasil panen kebun miliknya, upah kerja, dan dividen saham pabrik. Keunggulan lain adalah kontinuitas bahan baku untuk PKS akan terjamin karena petani merasa memiliki PKS sehingga kemungkinan menjual TBS ke PKS lain akan terhindar.
- ❑ Perusahaan pengembang (developer) akan mengembalikan modal yang dipakai (dana sendiri, dan pinjaman dari lembaga pembiayaan) dan akan mendapatkan keuntungan dari hasil kebun dan saham pabrik industri yang telah dibangun.

Pengembangan model ABK bagi petani di pedesaan yang telah memiliki lahan untuk dikembangkan perkebunan kelapa sawit, namun mereka tidak mempunyai modal usaha yang memadai untuk pengembangan perkebunan, maka dikembangkan melalui model ABK pola kemitraan. Bentuk kegiatannya adalah pengembangan perkebunan melalui pemanfaatan fasilitas kredit dari lembaga keuangan perbankan atau non perbankan. Tujuannya adalah membangun dan membina perkebunan rakyat di wilayah baru atau wilayah yang sudah ada dengan teknologi maju agar petani mampu memperoleh pendapatan yang layak. Juga mewujudkan suatu sistem pengelolaan usaha yang bersifat agribisnis dengan memasukkan berbagai kegiatan produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil secara terpadu.



Gambar 2 Rancangan Kepemilikan Modal pada Model Agroestate Berbasis Kelapa Sawit di Pedesaan.

Pelaksanaan pembangunan perkebunan model ABK pola kemitraan dilakukan oleh perusahaan di bidang perkebunan yang ditunjuk sebagai perusahaan inti (mitra) dengan pembinaan dan dukungan instansi-instansi pemerintah daerah yang fungsinya terkait dengan pengembangan perkebunan. Kemitraan yang dianut dalam pengembangan usaha perkebunan dengan memanfaatkan fasilitas kredit adalah pola kemitraan inti dengan plasma (petani). Dalam hubungan kemitraan ini petani diwakili oleh suatu badan usaha yang dibentuk langsung oleh petani yaitu koperasi. Koordinasi pembinaan proyek perkebunan model ABK pola kemitraan ini dilaksanakan oleh Tim Pembina Proyek Perkebunan Propinsi dan Kabupaten yang dibentuk oleh Gubernur dan Bupati. Dengan demikian kemitraan antara perusahaan perkebunan dengan koperasi berlangsung secara utuh dan berkesinambungan.

Program ABK Pola Kemitraan memberikan peluang kepada petani peserta untuk memiliki saham pada PKS. Tatacara pemilikan sahan ini dapat

diatur berdasarkan kesepakatan antara petani dalam hal ini diwakili oleh koperasi dengan perusahaan inti dan pemerintah melalui instansi yang terkait. Pada program ini disarankan pemilikan saham pada PKS sebaiknya melibatkan tiga komponen, yaitu: petani melalui koperasi; perusahaan inti; dan pemerintah daerah. Sedangkan komposisi dari pemilikan saham dapat diatur berdasarkan kesepakatan dari ketiga komponen tersebut. Rancangan pemilikan modal PKS melalui Program ABK Pola Kemitraan juga sama dengan model pemilikan modal pada ABK petani baru yang telah disajikan pada Gambar 2.

Pemberdayaan ekonomi pedesaan dengan model ABK Pola Kemitraan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Petani peserta ABK Pola Kemitraan adalah penduduk setempat yang memiliki lahan termasuk para petani yang lahannya terkena pembangunan kebun kelapa sawit KKPA atau yang belum dan sudah menjadi anggota koperasi.
- Persiapan dan penetapan calon petani peserta dilakukan oleh pengurus koperasi diketahui kepala desa sebagai dasar pengesahan oleh bupati.
- Para calon petani peserta diberi kesempatan untuk berperan serta dalam pembangunan kebun sebagai tenaga kerja.
- Petani peserta mendapat hak berupa kebun kelapa sawit dengan luas sesuai dengan perjanjian kerja sama yang telah ditetapkan antara petani dengan koperasi dan perusahaan inti.
- Petani peserta menerima hasil penjualan TBS setelah dipotong cicilan kredit dan kewajiban terhadap koperasi.
- Petani peserta menerima sertifikat hak milik atas kebun kelapa sawit setelah lunas kredit.
- Petani berhak meminta pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan kebun kepada pengurus koperasi melalui rapat anggota.
- Para petani peserta harus patuh dan taat terhadap segala ketentuan yang telah ditetapkan dalam pembangunan kebun ABK Pola Kemitraan.
- Petani berhak memperoleh kesempatan untuk membeli saham di PKS yang dibangun oleh perusahaan inti.

Daftar Pustaka

Almasdi Syahza., 2003. Paradigma Baru: Pemasaran Produk Pertanian Berbasis Agribisnis di Daerah Riau, dalam *Jurnal Ekonomi*, Th. VIII/02/Juli/2003, PPD&I Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta.

-----., 2005a. Analisis Daya Dukung Wilayah Terhadap Industri Hilir Kelapa Sawit di Riau. *Jurnal Ekonomi*, Th X/02/Juli/2005: PPD&I Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta.

-----., 2005b. Dampak Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Multiplier Effect Ekonomi Pedesaan di Daerah Riau, dalam *Jurnal Ekonomi*, Th. X/03/November/2005. Jakarta: PPD&I Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara.

-----., 2007a. Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan Berbasis Agribisnis di

- Daerah Riau, Penelitian Fundamental DP2M Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- ., 2007b. Percepatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan dengan Model Agroestate Berbasis Kelapa Sawit, dalam *Jurnal Ekonomi*, Th.XII/02/Juli/2007, PPD&I Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta.
- ., 2007c. Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Dan Kesejahteraan Petani Di Daerah Riau, dalam *Jurnal Sorot*, Vol 1 No 2, Oktober 2007, Lembaga Penelitian Universitas Riau, Pekanbaru.
- ., 2008a, Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan Melalui Pemberdayaan Koperasi Berbasis Agribisnis Di Daerah Riau, DP2M Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- ., 2008b, Model Pemasaran Produk Pertanian Berbasis Agribisnis Sebagai Upaya Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan, dalam *Jurnal Ekonomi*, Th.XIII/01/Maret/2008, PPD&I Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta.
- ., 2009a, Perumusan Model Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemetaan Kelembagaan Ekonomi Berbasis Agribisnis Di Propinsi Riau, DP2M Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- ., 2009b, Kelapa Sawit: Dampaknya Terhadap Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan Di Daerah Riau (Penelitian Hibah Kompetensi Tahun I), DP2M Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- ., 2010, Kelapa Sawit: Dampaknya Terhadap Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan Di Daerah Riau (Penelitian Hibah Kompetensi Tahun II), DP2M Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- Bustanul Arifin., 2001. *Spektrum Kebijakan Pertanian Indonesia*, Erlangga, Jakarta.
- Iyung Pahan, 2007, *Kelapa Sawit Manajemen Agribisnis dari Hulu Hingga Hilir*, Penebar Swadaya, Jakarta.
- Wiwik Suhartiningsih., 2003, Membangun Agroindustri Berbasis Kelapa Sawit, dalam *Usahawan Indonesia* No 02/TH.XXXII Februari 2003, Lembaga Manajemen FE-UI, Jakarta.
- Setiadi Wijaya, N.H., 2002, Membangun Koperasi dari Mimpi Buruknya, dalam *Jurnal Usahawan Indonesia*, No. 07/TH. XXXI Juli 2002, Lembaga Manajemen FE UI, Jakarta,
- Yuswar Zainal Basri., 2003, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan, dalam *Usahawan Indonesia* No 03/TH.XXXII Maret 2003, Lembaga Manajemen FE-UI, Jakarta.